

Tantangan Transisi Berkeadilan di Indonesia: Kebutuhan Dana Besar, Namun Proyek Belum Siap Didanai

Penulis : ICSP (SSH)
Keterangan : CONFERENCE HIGHLIGHTS
The 11th Sustainability Practitioner Conference (SPC) 2026 - "Driving Just Transition: From Strategy to Real Impact"
Sesi : Panel Discussion - "Policy, Regulation & Industry Leadership in Driving Just Transition".



Skala kebutuhan pendanaan menjadi titik awal diskusi. Advisor to the Director General for State Asset Optimization Affair Kementerian Keuangan RI, Nella Sri Hendriyetty, memaparkan bahwa target iklim kedua Indonesia memerlukan investasi sekitar USD 472,6 miliar pada 2031-2035, dengan sekitar 75,8 persen di antaranya untuk sektor energi. Pendanaan publik sepanjang 2016-2023 baru menutup sekitar 7,7 persen dari kebutuhan itu. Karena itu, pemerintah tidak menempatkan diri sebagai pembiaya tunggal.

"Bagaimana regulasi yang disiapkan itu bisa crowding-in. Pemerintah itu pada dasarnya memancing supaya dana-dana swasta dan dana internasional bisa masuk. Dari situ kita berharap emisi lebih rendah, ekonomi kita resilien, pertumbuhannya dinikmati seluruh lapisan penduduk Indonesia, dan udara kita lebih bersih," ujar Nella.

Dalam diskusi mengemuka bahwa perbankan berperan sebagai katalis mobilisasi kapital, tetapi modal tidak otomatis mengalir. Proyek yang belum siap didanai, tenor panjang, dan risiko yang belum terbagi masih menjadi kendala, sehingga skema blended finance dan penjaminan terus diujicoba. Insentif harga bagi pendanaan hijau pun belum terasa signifikan, sehingga dukungan kebijakan tambahan masih dibutuhkan.

Namun, dana dan proyek yang siap saja belum cukup. Transisi juga menyentuh manusia di dalamnya, seperti pekerja dan daerah yang selama ini bergantung pada batu bara. Nella menyebut sekitar 30-35 ribu pekerja PLTU batu bara, belum termasuk kontraktor, pemasok, dan penyedia jasa di sekitarnya, akan terdampak ketika pembangkit dipensiunkan. Karena itu, perlindungan sosial dan pelatihan keterampilan baru perlu disiapkan sejak dini.

"Yang sentral dari struktur just transition kita adalah seberapa siap masyarakat kita mendukungnya. Karena kalau masyarakatnya enggak siap, ya investasi juga enggak akan masuk," kata Nella.

Praktik di tingkat perusahaan tergambar dari pengalaman industri energi. Corporate Climate Change & Energy Transition Manager PT Medco Energi Internasional Tbk, Agustina Parwitosari, menyebut transisi di hulu migas dijalankan bertahap dan bertanggung jawab. Perusahaan menargetkan net zero Scope 1 dan 2 pada 2050 serta Scope 3 pada 2060, dengan target antara 2025 yang menurutnya sudah tercapai.

"Just transition ini tentunya bukan hanya sekadar komitmen keberlanjutan, tapi juga bagaimana menjaga keberlangsungan usaha di jangka panjang," ujar Agustina. Menurutinya, rencana transisi berkeadilan membantu perusahaan menjawab ekspektasi investor dan publik, menyiapkan tenaga kerja, serta menjaga izin sosial untuk beroperasi (social license to operate). "Intinya, ini investasi, tapi investasi jangka panjang yang nantinya harusnya menciptakan nilai bagi perusahaan."

Perusahaan juga menjadikan pelaporan sebagai sarana akuntabilitas: laporan keberlanjutan diasurans pihak ketiga dan memuat capaian sekaligus kekurangan, sementara pelaporan iklim disampaikan lewat CDP. Agustina menilai keterbukaan mendorong tindakan nyata, karena komitmen yang sudah disampaikan ke publik menimbulkan tanggung jawab untuk menepatinya. Saat ditanya soal kekhawatiran transisi hanya menjadi transition washing, ia mengakui rencana transisi berkeadilan belum diasurans karena baru diluncurkan tahun lalu dan KPI yang terukur masih disusun. Sebagian implementasi sudah berjalan, dan asurans akan menyusul bertahap.

Kemitraan yang lebih luas turut menopang upaya ini, salah satunya Just Energy Transition Partnership (JETP), kolaborasi pemerintah Indonesia dengan mitra internasional yang diluncurkan pada KTT G20 Bali 2022. Di dalamnya, Kerangka Transisi Berkeadilan dirumuskan pada 2023-2024 dengan sembilan standar. Delapan standar memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, sedangkan standar ke-9 tentang diversifikasi dan transformasi ekonomi memastikan komunitas sekitar proyek ikut menikmati manfaat.

Penerapannya bertumpu pada empat hal: regulasi yang terus diperkuat, pembiayaan, kemitraan dengan komunitas lewat mekanisme yang sudah ada seperti Musrenbang, dan tata kelola yang melibatkan pemerintah daerah serta pusat dalam pemantauan, tidak hanya perusahaan. Pemerintah daerah perlu dilibatkan sejak awal karena banyak harapan warga menyangkut tugas pemerintah daerah. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan transisi berkeadilan bukan daftar periksa kepatuhan, melainkan komitmen bersama kebijakan, keuangan, dan industri untuk membangun ekonomi lokal yang tangguh sebelum proyek berikutnya dimulai.

Artikel ini merupakan CONFERENCE HIGHLIGHTS dari acara The 11th Sustainability Practitioner Conference (SPC) 2026 - "Driving Just Transition: From Strategy to Real Impact, khususnya pada sesi Panel Discussion - "Policy, Regulation & Industry Leadership in Driving Just Transition".

Artikel ini tersedia dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Versi Bahasa Indonesia disediakan untuk memudahkan akses bagi pembaca Indonesia.